

Peran Mahasiswa Asing melalui Budaya terhadap Dinamika Sosial Politik Kota Surakarta

Setyasih Harini

Universitas Slamet Riyadi

Ganjar Widhiyoga

Universitas Slamet Riyadi

Abstrak: Citra politik yang baik menjadi salah satu unsur yang dipakai pemerintah dalam mengelola kekuasaannya. Pembangunan citra tersebut dapat dilakukan melalui budaya karena memiliki nilai-nilai universal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah yang terkait dengan bagaimana peran mahasiswa perempuan asing melalui budaya lokal dalam membangun dinamika sosial politik Kota Surakarta. Untuk mendalami hal ini penggunaan teori politik pencitraan, diplomasi budaya tidak dapat diabaikan. Sebagai riset kualitatif, peneliti menggunakan survei sebagai langkah awal yang diperkuat dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pengelola instansi pendidikan sebagai tempat para mahasiswa perempuan asing menempuh studi dan mahasiswa perempuan asing itu sendiri. Sehingga diperoleh titik temu bahwa pemerintah kota mendapat manfaat dari kehadiran mahasiswa perempuan asing. Pertama, mereka dapat mengurangi ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Kedua, pemerintah lokal dapat memperbaiki citra positifnya. Ketiga, masyarakat Kota Surakarta secara langsung atau tidak langsung mendapat manfaat dalam hal kreativitas untuk mendukung kemandirian dalam kehidupan sosial ekonomi.

Kata kunci: budaya, sosial, perempuan, mahasiswa asing

Abstract: A good political image is one of the elements used by the government in managing its power. The image development can be done through culture because it has universal values. This study aims to find solution problems related to how the role of foreign students through local culture in building the social and political dynamics of Surakarta city. To explore this, researcher use political imaging theory and cultural diplomacy. As qualitative research, researchers use surveys as a first step that is strengthened by interviews. Interviews were conducted with educational institutions as a place for foreign students to study and women foreign students themselves. So that the meeting point is obtained that the city government benefits from the presence of foreign students. First, they contribute to reduce tension in society. Second, it can be a chance for local government to improve their positive image. Third, the people of Surakarta City directly or indirectly benefit in terms of creativity to support independence in socio-economic life.

Key words: culture, social women, foreign student

Korespondensi Penulis:

Setyasih Harini, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta

E-mail: setyasih.rini@gmail.com

PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan dan potensi yang tidak ternilai. Keragaman tersebut menjadi nilai positif bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat merawat dan melestarikannya. Di sisi lain, seluruh elemen masyarakat Indonesia memiliki tugas tersendiri agar tidak terjadi gesekan yang dapat berujung pada konflik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwihadiah (2018) berkaitan dengan peristiwa bom bunuh diri pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018. Pada waktu itu bertepatan dengan datangnya Bulan Suci Ramadhan. Peledakan bom bunuh diri yang terjadi di Kota Surabaya dan Sidoarjo tersebut dilakukan oleh sebuah keluarga. Pelaku bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh seorang wanita (ibu) beserta anak-anaknya. Peristiwa bom bunuh diri memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat yakni ketakutan untuk ke luar rumah dan kelesuan terhadap aktivitas sehari-hari yang berujung pada terhambatnya kegiatan ekonomi.

Gambaran di atas menjadi satu dari sekian banyak peristiwa yang mengguncang keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di negara ini. Di sinilah perlunya kembali pada nilai-nilai lokal yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, yakni melalui budaya. Budaya menjadi sebuah alat yang dapat diterima oleh semua bangsa. Budaya juga memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Relasi antarbudaya dengan berbagai bentuknya menjadi peredam terjadinya pergesekan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena relasi tersebut tumbuh secara alami dan terorganisasi dalam masyarakat (Ang, 2015).

Dengan sifatnya yang universal, budaya menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial politik, meningkatkan stabilitas lingkungan serta mempersatukan berbagai bangsa. Pentingnya budaya dalam dinamika sosial politik dalam kancah internasional dikemukakan oleh Mary Douglas dan Hugh Dyer menjelaskan bahwa munculnya budaya sekuler secara global memberi kesempatan kepada setiap orang dari berbagai latar belakang untuk hidup lebih harmonis dan lebih dekat. Peter Black dan Kevin Avruch menunjukkan bahwa kegagalan relasi dari berbagai budaya disebabkan karena kurangnya memahami budaya dari masing-masing negara peserta. Robert Rubinstein menjelaskan memahami simbol-simbol budaya bangsa lain dapat memperlancar berbagai operasi perdamaian yang dilakukan oleh organisasi internasional (Jacquin dkk, 2015). Dari penelitian tersebut menunjukkan

bahwa budaya menjadi sarana untuk saling memahami diantara masyarakat yang saling berbeda.

Pembahasan mengenai budaya dalam studi hubungan internasional yang dilakukan oleh para ilmuwan Eropa pada abad 19 dan 20 masih terlalu sempit. Pada waktu itu, pembahasan budaya hanya seputar seni, bahasa, cara hidup, sistem dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat bangsa. Hal itulah yang menjadikan seni sebagai “*high culture*” yang di dalamnya juga meliputi opera, musik klasik, dan pustaka. Dalam penelitian Stefan Czarnowski (2015) menggambarkan budaya sebagai peninggalan nenek moyang merupakan hasil kreativitas dan usaha untuk mempertahankan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penelitian kedua ini lebih menitikberatkan pada pentingnya mewarisi budaya agar tidak punah sebab dari inilah menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan. Dari kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya sebagai sebuah warisan dari generasi sebelumnya penting untuk dilestarikan.

Di era global seperti sekarang upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya bukan hanya dilakukan kepada generasi berikutnya saja tetapi juga perlu cakupan yang lebih luas. Kota Surakarta dengan slogan *Solo The Spirit of Java* (Jiwanya Jawa) yang diangkat dari sejarah keberadaan dua keraton yakni Kasunanan Hadiningrat dan Pura Mangkunegara menjadi salah satu upaya pencitraan Kota Surakarta (Solo) sebagai pusat kebudayaan Jawa. Pencitraan Kota Surakarta sebagai jiwanya Jawa memerlukan kemampuan untuk menjawab tantangan dinamika sosial politik. Masyarakat secara umum terlihat tenang, ramah dan lembut. Gambaran tersebut belum dapat diwujudkan secara menyeluruh mengingat latar belakang masyarakat yang beragam. Keberagaman tersebut dilihat dari agama dan etnis yakni Jawa (pribumi) dan keturunan baik Arab maupun China atau yang kerap diberi nama warga Tionghoa yang kesemuanya memiliki kekhasan tersendiri.

Dari sinilah Kota Surakarta memberi kesempatan kepada warga asing yang tinggal dan belajar untuk berpartisipasi dalam bidang kebudayaan guna mendukung dinamika sosial politik guna mengurangi gesekan dalam masyarakat karena perbedaan latar belakang. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Surakarta adalah memberikan kesempatan kepada warga asing khususnya yang berstatus sebagai mahasiswa untuk belajar budaya Jawa. Mahasiswa perempuan asing yang menempuh studi sarjana berada di dua institusi pendidikan milik pemerintah yakni Universitas

Sebelas Maret dan Institut Seni Indonesia. Jumlah mahasiswa yang sedang menempuh studi saat ini adalah 35 orang. Permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini adalah bagaimana peran mahasiswa perempuan asing melalui budaya Jawa dalam membangun dinamika sosial politik Kota Surakarta.

Politik Pencitraan Pemerintah Kota Surakarta

Pencitraan berasal dari kata citra sebagai gambaran yang seringkali diterapkan oleh para kandidat politik atau politikus yang telah memerintah (Dichter, 1985, Saren, 2016). Istilah ini juga biasa dipakai untuk memperkenalkan atau menggambarkan suatu produk untuk memberikan kesan menarik dan mendalam kepada orang lain. Melalui kesan menarik tersebut, citra terhadap seseorang atau produk diawali dengan pengaruh pada pikiran dan berdampak pada tindakan. Saren (2016) memberikan istilah tersendiri mengenai pencitraan. Menurutnya pencitraan sering dikaitkan dengan politik praktis sehingga disebut sebagai Destination Image (DI).

Destination Image dalam formasinya terdiri dari kognitif, afektif dan konatif. Komponen kognitif mengacu pada pengetahuan dan kepercayaan tentang suatu tujuan politik, komponen gambar afektif mengacu pada emosi, perasaan, dan keterikatan terhadap tujuan politik. Berdasarkan evaluasi kognitif dan afektif, ada komponen kognitif yang mengacu niat perilaku seorang politikus, praktisi, akademisi sampai wisatawan. Dalam pelaksanaannya DI seringkali dikaitkan sebagai metode promosi campuran antara kekuasaan dengan kontrol program. Melalui DI tersebut para pelaku politik dapat memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk mengontrol program yang dirancang agar sesuai dengan tujuan politiknya.

Malik (2017) memaparkan bahwa *image* penting bagi para politisi untuk menekankan pada konstruksi bangunan politiknya terutama yang terkait dengan pembangunan identitas nasional. Politisi melalui pemanfaatan *image* tersebut dapat menunjukkan citra positifnya sebagai pembela hak-hak nasional rakyat sekaligus peningkatan citra nasional dalam konteks hubungan luar negeri. Dari penjelasan tersebut jelas menunjukkan bahwa politik pencitraan menjadi salah satu alat bagi politisi untuk membangun konstruksi masyarakat sesuai dengan tujuan politiknya. Sehingga dalam rentang waktu tertentu politikus dapat memperoleh dampak positif terhadap pembangunan citra yang telah dikemas sebelumnya.

Diplomasi Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta

Diplomasi budaya merupakan sebuah terminologi yang muncul pada abad ke-20. Diplomasi jenis ini merupakan bagian dari diplomasi pemerintah yang lebih menitikberatkan pada pengenalan dan promosi budaya kepada masyarakat mancanegara. Kemunculannya yang belum lama dalam studi hubungan internasional lebih disebabkan karena (1) kurangnya perhatian politisi dan diplomat mengenai pentingnya budaya sebagai sarana untuk membantu pencapaian kepentingan nasional. Pada prinsipnya, para diplomat mendukung adanya diplomasi budaya namun belum dilaksanakan secara efektif. (2) Pelaksanaan diplomasi budaya memerlukan waktu dan anggaran yang lebih banyak dengan perolehan manfaat yang memerlukan waktu lama (Simon Mark, 2014). Secara konseptual masih terjadi kerancuan mengenai diplomasi budaya. Wyszkomirski (2003) mencatat terminologi tersebut ketika diterapkan di Prancis dengan istilah *Diplomatie Culturelle* menjadi *International Culture Relations* sama seperti Australia, Kanada, Singapura dan Inggris. Sementara Austria, Netherland dan Swedia memaknai diplomasi budaya sebagai *International Culture Policy*.

Dalam dekade terakhir, diplomasi budaya menjadi sebuah perspektif studi budaya dalam konteks hubungan internasional. Penekanannya pada evolusi yang terjadi dalam diplomasi publik baru (terutama Cull 2009, Davis Cross dan Melissen 2013; Hayden 2011), dalam pandangan Simon Mark (2014: 1-2), diplomasi budaya merupakan praktek lain dari diplomasi publik yang ditandai dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan audiens dari masyarakat mancanegara. Pengaruh positif yang ditimbulkan dari diplomasi ini menjadi tujuannya dengan tidak meninggalkan tujuan dari kepentingan nasional. Pelaksanaan dari diplomasi budaya memberikan kontribusi positif terhadap *image* nasional dan *branding*. Secara domestik, diplomasi budaya berkontribusi terhadap peningkatan kohesi sosial nasional terutama bagi kelompok minoritas. Hal ini senada dengan penelitian Titi Nur Vidyarini dan Danielle Brady (2012) bahwa diplomasi budaya merupakan aspek penting dan memegang peran kunci dalam pelaksanaan diplomasi publik. Melalui diplomasi ini, pemerintah berusaha memperkenalkan dan mempromosikan budayanya kepada publik mancanegara dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional, meningkatkan *image* positif dan reputasi negara.

Diplomasi budaya selama ini dipercaya sebagai alat yang lebih efektif untuk membangun kepercayaan diantara masyarakat yang berbeda dapat dilihat dari Richard

T. Arndt (2005). Arndt sendiri sependapat dengan gagasan besar dari Joseph Nye yang ditulis dalam bukunya dengan judul *The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century*. Dalam buku tersebut, Nye ingin menunjukkan diplomasi budaya dari segi pelaksanaan dan dampaknya dalam hubungan yang terjalin diantara negara-negara yang terlibat. Dari surveinya menunjukkan bahwa diplomasi budaya mampu menciptakan fondasi kepercayaan untuk mencapai kepentingan ekonomi, politik dan bahkan perjanjian militer. Dalam sudut pandang kultural-teoritis, secara tidak langsung menguraikan budaya sebagai identitas nasional sehingga menjadi prasyarat utama dalam diplomasi budaya yang efektif.

Dalam dunia global saat ini yang ditandai dengan cepatnya arus transnasional multidireksional yang semakin intensif maka upaya untuk memaksakan identitas nasional dari satu negara kepada negara lain menjadi tantangan tersendiri. Kegiatan diplomasi dengan mengangkat budaya menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan saling kesepahaman diantara negara-negara. Bagi negara yang multikultur menjadi sebuah "keharusan" untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang dimiliki dibandingkan dengan negara yang relatif homogen seperti Korea Selatan. Perjuangan negara-negara multikultur untuk menempa citra persatuan negaranya melalui budaya sendiri menjadi sebuah nilai tersendiri yang perlu mendapat pengakuan dan legitimasi dari negara-negara lain.

Diplomasi budaya sebagai fokus proyeksi dari *soft power*, sebenarnya mengadopsi pemahaman tentang budaya dan komunikasi yang berasal dari teori budaya kontemporer. Proses mengadopsi dengan menekankan budaya sebagai proses yang berkelanjutan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat internasional terhadap identitas yang dimilikinya. Pemahaman demikian akan membantu melegitimasi dan meningkatkan pendekatan dialogis dan kolaboratif terhadap diplomasi budaya yang telah dijalankan oleh sebuah negara.

Proses pembangunan kepercayaan diantara masyarakat yang berbeda kewarganegaraan melalui diplomasi budaya pada hakikatnya menjadi perpanjangan tangan dari politik luar negeri. Seperti dinyatakan oleh Marta Ryniejska dan Kieldanowich (2015) bahwa diplomasi budaya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negerinya. Pemanfaatan budaya sebagai sarana berdiplomasi dimaksudkan untuk menunjukkan identitas dan jati diri negara. Hal ini tidak terlepas dari hakikat budaya sendiri sebagai buah dari hasil kreativitas

masyarakat secara turun temurun untuk menjalani kehidupan. Pada tahap selanjutnya, budaya juga menjadi sarana untuk menciptakan *image* positif dan membantu pencapaian tujuan dan kepentingan nasional.

Dari beberapa pemahaman mengenai diplomasi budaya menunjukkan bahwa sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pencapaian kepentingan nasional menjadi sesuatu yang mutlak. Sarana untuk mencapainya dapat dilakukan dengan pengenalan budaya sebagai sebuah warisan leluhur. Pada tahap mulanya, diplomasi budaya dilakukan dengan melakukan promosi sebagai bentuk pengenalan kepada audiens mancanegara seperti penyelenggaraan festival. Pada tataran selanjutnya adalah mengundang masyarakat mancanegara untuk lebih dekat dengan budaya yang ditawarkan. Dalam pandangan Wolfgang Friedmeier (2017) pengalaman pribadi yang terbangun dengan mengikuti program budaya akan membentuk sebuah pemikiran tersendiri terhadap suatu negara. Secara individual, orang tersebut juga akan merasakan dan mengalami nilai, keunikan dan keutamaan dari suatu budaya. Jarak yang jauh dengan negara asal mengharuskan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru agar mendapat pengakuan. Hal ini sekaligus membentuk suatu ikatan emosional dengan negara lain melalui program budaya.

Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sekilas mengenai perempuan dan pembangunan menekankan adanya persamaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam mengisi dan menikmati pembangunan. Hal tersebut seakan menjadi sebuah tuntutan yang tidak terlepas dari pengalaman perempuan dari negara-negara berkembang yang disibukkan dengan urusan domestik. Sesuai dengan konsep feminisme pembangunan, perempuan hendaknya diberi hak dan kesempatan untuk mengurus dan terlibat dalam bidang-bidang selain rumah tangga. Antara lain pendidikan agar mendapatkan pengalaman tersendiri (Judith Lorber, 2013). Dalam pandangan Familusi (2012) pembangunan bisa berjalan lebih efektif ketika laki-laki dan perempuan memahami budaya secara benar sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Budaya dikategorikan ke dalam tradisi, kepercayaan, perilaku, bahasa, karya manusia, dan sebagainya. Familusi sendiri mengutip pendapat E.B Tylor mengenai budaya sebagai pengetahuan dan kepercayaan, seni, moral dan hukum yang mengikat dan mengatur kehidupan manusia dalam sebuah masyarakat.

Budaya sebagai kearifan lokal dalam pandangan Mungmachon (2012) merupakan seperangkat pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan akumulasi pemahaman lokal yang muncul dari suatu masyarakat. Kearifan lokal masih menurutnya merupakan warisan leluhur dalam bentuk seperangkat pengetahuan dan nilai-nilai hidup yang berkembang secara lokal dan diteruskan dari satu generasi ke generasi dalam masyarakat sebagai pedoman hidup. Dengan fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari maka kearifan lokal memberi petunjuk dan etika dalam menjalin relasi dengan anggota keluarga, masyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan ketetanggaan (Mungmachon, 2012). Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa budaya sebagai kearifan lokal akan terpelihara jika diperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Upaya untuk mendatangkan masyarakat mancanegara untuk melihat secara langsung dan mempelajari budaya menjadi sarana untuk melestarikan budaya itu sendiri serta mendorong pembangunan khususnya bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya studi mendalam atas peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi atau individu tertentu. Umar Suryadi Bakry (2016) menambahkan bahwa secara umum interpretasi data kualitatif dilakukan dalam tiga tingkat. Pertama, *first-order interpretation* sebagai interpretasi dari sudut pandang orang-orang yang diteliti. Di sini menjelaskan bahwa peneliti hendaknya membangun komunikasi dengan subyek yang diteliti yang berperan sebagai informan. Dengan komunikasi tersebut diketahui informasi yang bisa berkembang setiap saat. Kedua, *second-order interpretation* sebagai interpretasi kualitatif dari sudut pandang peneliti yang sedang melakukan penelitian. Peneliti selain mengandalkan informasi dari para informan juga mencari data untuk memperkuat validitasnya. Ketiga, *third-order interpretation* sebagai interpretasi kualitatif yang dibuat oleh pembaca laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan pertama, melakukan survei. Survei dilakukan di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi dan kegiatan yang dilakukan para mahasiswa perempuan asing yang terkait dengan kesenian tradisional masyarakat Surakarta. Kedua, wawancara yang peneliti lakukan dengan mahasiswa perempuan asing mengingat kepedulian dan keseriusannya dalam

menekuni tradisi membatik, sebagai penari topeng dan penabuh gamelan. Wawancara dilakukan dengan satu orang mahasiswa perempuan asing dari Timor Leste, satu orang dari Hungaria, satu orang dari Spanyol, dan satu orang dari Italia. Mahasiswa perempuan asing tersebut sedang menjalani studi di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Sebagai objek dari penelitian ini adalah keterlibatan mahasiswa perempuan asing ditinjau dari aktivitasnya dalam mempelajari budaya Jawa khususnya membatik, menjadi penari topeng dan menabuh gamelan. Untuk mendukung kelancaran dalam proses penelitian, penelusuran pustaka secara *online* menjadi rujukan dalam memperkuat data sekunder. Sebagai penelitian kualitatif maka data bisa berkembang setiap saat yang dapat diperoleh dengan dokumentasi dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

Untuk analisis datanya dilakukan sejak data mulai dikumpulkan. Artinya ketika peneliti sedang mengumpulkan data proses analisis data tidak perlu menunggu sampai semua data yang dibutuhkan terkumpul namun bisa dilakukan secara bersamaan. Pertama adalah mengidentifikasi data yang didapat untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang diteliti, kemudian memetakannya. Identifikasi data yaitu melakukan penyaringan data yang telah terkumpul dan dipilih yang sesuai dengan fokus permasalahan yang sedang diteliti yakni dengan membuat gambaran mengenai program Darmasiswa. Proses pengidentifikasian data ini juga bisa disebut sebagai reduksi data dengan memilih dan memilah data yang telah terkumpul khususnya mengenai aktivitas mahasiswa perempuan asing dalam melestarikan kearifan lokal Jawa (Kothari, C. R, 2004). Langkah selanjutnya adalah pembuatan verifikasi atau kesimpulan sementara berdasarkan pada data terpilih yang terkait dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN

Pemerintah Kota Surakarta pada masa walikota sekarang memberikan beasiswa kepada 35 mahasiswa perempuan asing yang tersebar dari berbagai negara baik lingkup Asia Tenggara dan Eropa. Dalam riset ini, peneliti hanya melakukan wawancara dengan mahasiswa perempuan asing. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa asing dengan persyaratan menekuni dan mempraktekkan Bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari serta mempelajari budaya lokal baik itu membatik, tarian atau memainkan alat musik gamelan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan pengajar (dosen Ilmu

Hubungan Internasional dari UNS) menunjukkan bahwa budaya Indonesia merupakan potensi kekayaan yang harus disebarluaskan kepada masyarakat internasional. Harapan dari penyebaran tersebut dapat meningkatkan citra positif negara. Pengajar (dosen tari dari ISI) juga menyampaikan bahwa budaya sebagai identitas negara wajib dilestarikan baik kepada generasi muda maupun kepada masyarakat mancanegara. Dari kedua informan tersebut juga menyetujui bahwa pengenalan budaya kepada mahasiswa perempuan asing melalui beasiswa Darmasiswa menjadi salah satu sarana untuk mengantisipasi gesekan dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi mengingat budaya masyarakat Surakarta yang masih memegang "*ewuh pekewuh*". Artinya masyarakat dapat meredakan gesekan atau konflik di antara warganya ketika ada tamu yang tinggal di wilayahnya. Di sisi lain pemerintah setempat juga dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga budaya lokal dengan memperkenalkannya kepada masyarakat mancanegara.

Dengan mahasiswa Timor Leste didapatkan penjelasan bahwa sebagai pendatang harus dapat berbaur dengan masyarakat. Sebagai mahasiswa internasional mau tidak mau harus belajar memahami karakter masyarakat setempat dan mempelajari budayanya. Hal ini ditujukan supaya kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat. Mahasiswa dari Hungaria menyatakan bahwa budaya Surakarta atau Solo sangat menarik khususnya dalam upayanya untuk belajar menari. Alasan mahasiswa Hungaria untuk tinggal dan melanjutkan studi di Kota Surakarta karena ketertarikan akan masyarakatnya yang multietnis, multireligi dan multikultur. Menurut mahasiswa dari Spanyol, masyarakat Surakarta berkarakter lembut namun bisa meluap emosinya pada saat tertentu. Dengan alasan tersebut, mahasiswa dari Spanyol tertarik untuk mempelajari budaya lokal khususnya tari topeng. Sementara mahasiswa dari Italia masih berproses untuk mendalami seni karawitan. Menurut mahasiswa dari Itali, alunan suara yang keluar dari karawitan bisa memberikan kedamaian dan ketenangan. Dari kelima informan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surakarta memiliki filosofi luhur dari budaya yang dimilikinya. Kelima informan tersebut juga mempelajari budaya setempat dapat mendapatkan ilmu, keterampilan dan pengalaman tersendiri.

PEMBAHASAN

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah Propinsi Jawa Tengah yang mengalami perkembangan cepat. Kota ini terletak pada 110°-45'15" dan 110°-45'35" bujur timur

dan antara 7'-36" dan 7'-56" lintang selatan. Surakarta secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali pada bagian sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Kabupaten Sukoharjo juga membatasinya pada wilayah bagian barat. Kabupaten Karanganyar juga membatasi Surakarta pada bagian timur dan baratnya.

Kota Surakarta memiliki slogan *Solo The Spirit of Java* (Jiwanya Jawa) yang diangkat dari sejarah keberadaan dua keraton yakni Kasunanan Hadiningrat dan Pura Mangkunegara menjadi salah satu upaya pencitraan Kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. Warisan budaya dapat dijadikan salah satu potensi untuk meningkatkan daya tarik suatu kota, warisan budaya dibagi dalam dua unsur, yaitu *tangible* yang berupa benda berwujud dan *intangible* yang berupa benda yang tidak berwujud seperti: bahasa, ritual, kepercayaan, tarian, musik dan lain-lain yang ada di Kota Surakarta. Untuk memperkuat kepemilikan cagar budaya diberlakukanlah UU No. 5 tahun 1992. Dalam perkembangannya perundangan tersebut mengalami revisi menjadi UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya di Surakarta.

Selama tahun 2010, DPR bersama dengan pemerintah RI berupaya menata kembali aturan-aturan cagar budaya dalam atauran pada tahun sebelumnya. Ada pun pertimbangannya adalah: (1) Dari sisi ekonomi, cagar budaya harus mampu meningkatkan harkat kehidupan rakyat banyak. (2) Dari sisi tanggung jawab publik, pelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua orang. (3) Dari sisi peradaban, pelestarian cagar budaya harus membuka peluang sebagai upaya pengembangan dan pemamfaatnya oleh masyarakat. (4) Dari sisi tata kelola negara, pemerintah meringankan beban pelestarian yang ditanggung masyarakat (Langgeng, 2016:32).

Untuk mempermudah pelaksanaannya maka pelestarian cagar budaya diserahkan kepada pemerintah daerah. Ada beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah terhadap perawatan dan pelestarian cagar budaya yakni: (1) menetapkan etika pelestarian cagar budaya, (2) mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah, (3) menghimpun data cagar budaya, (4) menetapkan peringkat cagar budaya, (5) menetapkan dan mencabut status cagar budaya, (6) membuat peraturan pengelolaan cagar budaya, (7) menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya, (8) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum, (9) mengelola kawasan cagar budaya, (10) mendirikan dan membubarkan unit pelaksanaan teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum, (11) mengembangkan

kebijakan SDM di bidang keurbakalaan, (12) memberi penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya, (13) memindahkan dan menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan, (14) melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota, (15) menetapkan batas situs dan kawasan dan (16) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnah cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Dari kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta salah satu program yang dilakukan sesuai dengan kewenangan pada poin 12 adalah memberi penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya. Penghargaan tersebut dimaksudkan untuk mengajak setiap elemen masyarakat agar peduli dan turut melestarikan budaya Surakarta guna mengantisipasi terjadinya pergesekan di Kota Surakarta. Di sini pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program beasiswa Darmasiswa. Beasiswa tersebut ditawarkan kepada semua siswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia), seni dan budaya. Beasiswa Darmasiswa ditinjau dari sejarahnya telah didirikan pada tahun 1974. Indonesia sebagai bagian dari organisasi ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan budaya dengan membangun relasi yang harmonis dengan banyak negara. Program ini sebagai bagian dari inisiatif ASEAN sehingga pada awalnya hanya menerima siswa dari ASEAN. Pada tahun 1976 program ini diperluas ke negara lain. Hingga saat ini, jumlah negara yang berpartisipasi dalam program ini adalah lebih dari 111 negara dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Tujuan utama dari program Darmasiswa adalah untuk mempromosikan dan meningkatkan minat terhadap bahasa, seni dan budaya Indonesia di kalangan anak muda dari negara lain.

Para mahasiswa perempuan asing yang mempelajari budaya setempat memiliki peran tersendiri dalam dinamika sosial politik Kota Surakarta. Pertama, kehadirannya yang diundang oleh pemerintah melalui program beasiswa Darmasiswa merupakan sebuah citra positif bagi pemimpin Kota Surakarta. Walikota yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan niat, citra dan kapasitasnya sebagai pemimpin dalam pengelolaan warisan atau cagar budaya

setempat. Pemerintah kota diuntungkan dengan keberadaan para mahasiswa perempuan asing dalam mengurangi tensi gesekan atau bahkan konflik yang bisa berkembang dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari karakter masyarakat Surakarta yang masih menjaga jati dirinya agar terlihat ramah, terbuka dan mudah bergaul. Kedua, pemerintah diuntungkan dengan hadirnya mahasiswa perempuan asing dalam memupuk citra positif yang sangat penting perannya khususnya di tahun politik. Citra positif yang terbangun dapat menjadi sarana untuk meningkatkan popularitas pada masa kampanye. Ketiga, masyarakat Kota Surakarta secara langsung maupun tidak juga diuntungkan dari segi kreativitas guna mendukung kemandirian dalam kehidupan sosial ekonomi. Hal ini bisa dilihat ketika ada penyelenggaraan pentas internasional yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa kehadiran mahasiswa perempuan asing dalam sebuah masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap dinamika sosial politik. Melalui program beasiswa Darmasiswa, pemerintah Kota Surakarta telah berhasil membangun konstruksi kemasyarakatan baru yang didasarkan pada diplomasi budaya. Budaya yang disebarkan kepada mahasiswa perempuan asing dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk lebih merawat, mencintai dan melestarikannya. Hal ini sekaligus menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan citra politiknya untuk masa kini dan mendatang. Para mahasiswa perempuan asing tersebut pada gilirannya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kekuasaan dari para politisi sehingga memiliki kontribusi terhadap dinamika sosial politik Kota Surakarta.

REFERENSI

- Ang, Ien, dkk. 2015. *Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest?*, *International Journal of Cultural Policy*, Vol. 21, No. 4, 365–381.
- Arndt, Richard T. 2005. *The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century*, Washington D.S, Potomac Books.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. "Metode Penelitian Hubungan Internasional". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cull, N.J., 2009. *Public Diplomacy: Lessons from the Past*. CPD perspectives on public diplomacy. Los Angeles, CA: Figueroa Press.

- Davis Cross, M.K. and Melissen, J., 2013. *European Public Diplomacy. Soft Power at Work*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Dichter, Ernest. 1985. What's In An Image, *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 2 Iss 1 pp. 75 - 81.
- Dwihadiah, Desidaria Lumongga. 2018. "Ideologi dan Kekuasaan dalam Kampanye Anti Ketakutan di Media Sosial dalam Media dan Dinamika Sosial Politik Indonesia" (book chapter). Fisip Universitas Jenderal Soedirman bekerjasama dengan Yayasan Literasi Bangsa.
- Familusi. 2012. *African Culture and the Status of Women: the Yoruba Example*, The Journal of Pan African Studies, Vol 5 No. 1.
- Frieldmeier, Wolfgang. 2017. *Emotional Development and Culture: Reciprocal Contributions of Cross Cultural Research and Development*, Grand Valley State University.
- Hayden, C. 2011. *The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Jacquin, Dominique, dkk. 2015. *Culture in International Relations: An Introduction to the Special Issue*, Journal of International Studies. DOI: 10.1177/03058298930220030601.
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology: Methods & Techniques*. New Delhi: New Age International (P) Limited, Publishers.
- Mark, Simon. 2014. *Discussion Papers of Diplomacy: A Greater Role of Cultural Diplomacy*, Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Mungmachon, Roikwanphut. 2012. *Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol 2 No. 13, pp. 175-176.
- Nungraha, Langgeng. 2016. "Upaya Upaya Meningkatkan Daya Tarik Kota Surakarta Di Tingkat Internasional Melalui Warisan Budaya" dalam *Jurnal Transformasi* Vol.1 No. 30, (108-115).
- Ryniejska, Marta dan Kieldanowich. 2015. *Cultural Diplomacy as a Form of International Communication*, University of Wroclaw, Institute of International Studies, Warsawa.
- Saren, Hidayet Kislali Mihalıs Kavaratzis Michael. 2016. *Rethinking destination Image Formation*, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 10 Iss 1 pp. 1-17.
- Stelowska, Diana. 2015. *Culture in International Relations: Defining Cultural Diplomacy*, Vol. 1 Issue 3, Polish Journal of Political Science.